

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

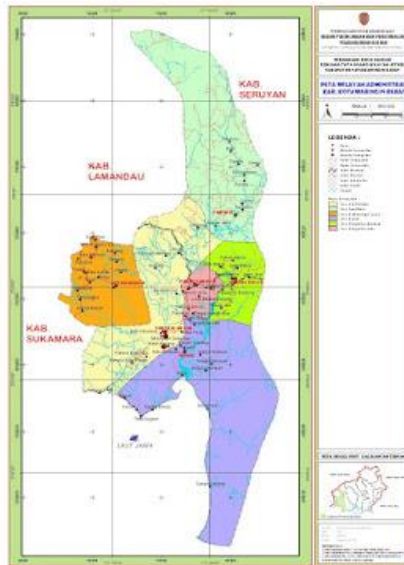
Kabupaten Kotawaringin Barat (KOBAR) berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang beribukotakan di Pangkalan Bun dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: 1° 19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 50' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km², dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai dengan UU. No. 5 tahun 2001, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Sedangkan Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi 6 kecamatan menurut peraturan daerah No. 10 tahun 2003 yaitu Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada dan Arut Utara.¹

Letak wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berbatasan diantara tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan memiliki keunggulan sebagai salah satu pintu gerbang masuknya pendatang ataupun pelancong ke Kalimantan Tengah bagian Barat, diantara empat kabupaten tersebut hanya wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki bandara kelas

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat 2016 . *Geografi dan Iklim* Hal. 1

(II) yaitu Bandara Iskandar. Dengan adanya akses transportasi udara di Kabupaten Kotawaringin Barat memudahkan bagi para pendatang seperti wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi wilayah Kalimantan Tengah bagian barat dengan lebih cepat dan efisien.

Gambar 1 : Peta Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik 2016

Transportasi merupakan sarana penunjang bagi industri pariwisata di Kalimantan Tengah bagian Barat ini sebagai penghubung antar pulau yang ada di Indonesia dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kotawaringin. Selain dengan mudahnya transportasi ke wilayah ini juga memiliki salah satu tempat wisata yang potensi wisatanya jika dikembangkan akan memiliki pamor seperti di pulau Bali.

Kotawaringin Barat memiliki banyak tempat wisata mulai dari alam, sejarah, hingga budaya dan salah satu tempat wisata terkenal yang telah menjadi “*icon*” wilayah ini adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting adalah kawasan konservasi untuk perlindungan flora dan fauna khas Kalimantan. Di kawasan ini terdapat satwa langka yang telah terancam dari kepunahan seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan Bekantan (*Nasalis larvatus*). Adapun Taman Nasional Tanjung puting terletak di semenanjung barat daya Kalimantan Tengah dan telah ada ketetapan berdasarkan SK. Kerajaan Kutaringin/HET ZELFBESTUUR VAN KOTAWARINGIN No. 24 tanggal 13 Juni 1936 dengan menetapkan bahwa wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai tempat binatang liar.²

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan bahwa Suaka Margasatwa Tanjung Puting masuk dalam daftar salah satu Cagar Biosfer di Indonesia. Berdasarkan data dan informasi, Suaka Margasatwa Sampit ditata batas pada tahun 1969/1970 – 1973/1974 oleh Tim Tata Batas dengan nama Suaka Margasatwa Tanjung Puting, dan Berita Acara tata batas (BATB) di tanda tangani pada tanggal 31 Januari 1977. Penetapan Luas Suaka Margasatwa Tanjung Puting berdasar BATB, ditetapkan seluas 270.040 Ha berdasar SK Menteri

² Website Balai Taman nasional Tanjung puting
<https://tntanjungputing.org/sejarah> diakses pada 22 Januari 2018

Pertanian No.: 43/Kpts/DJ/I/1978 tanggal 8 April 1978, tentang Penetapan Kawasan Hutan.³

Lebih lanjut, kawasan area Suakamarga Satwa Tanjung Puting kemudian dinyatakan sebagai calon taman nasional melalui SK Menteri Pertanian RI No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982. Dalam melandasi kegiatan lapangan, Direktur Jenderal PHPA melalui SK No. 46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984, menetapkan bahwa wilayah kerja (calon) Taman Nasional Tanjung Puting adalah Suaka Margasatwa Tanjung Puting seluas 300.040 Ha. Pada tahun 1996 diubah fungsikan dari calon menjadi Taman Nasional Tanjung Puting.⁴

Taman Nasional Tanjung Puting adalah rumah bagi hewan endemik kalimantan yaitu orang utan dan bekantan, saat ini orangutan termasuk salah satu hewan yang terancam dari kepunahan, menurut IUCN (*The International Union of Conservation and Nature*) *Red List* mengklarifikasi bahwa orangutan Borneo sebagai spesies yang terancam punah (*endangered*), (*critically endangered*). Orangutan sebagai spesies yang telah tercantum dalam Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Fauna dan Flora Liar. Lebih lanjut, di Indonesia maupun di Malaysia orangutan adalah hewan yang dilindungi secara hukum. Namun demikian, hukum dan peraturan saja jelas tidak cukup untuk melindungi

³ ibid

⁴ Ibid

spesies orangutan dari ancaman kepunahan. Konservasi adalah langkah yang bijak untuk melestarikan dan melindungi hewan ini. Konservasi orangutan memerlukan upaya yang komperhensif dan terintergrasi oleh *stakeholders*, baik dilapangan dan diarena politik untuk memastikan keberhasilannya.⁵

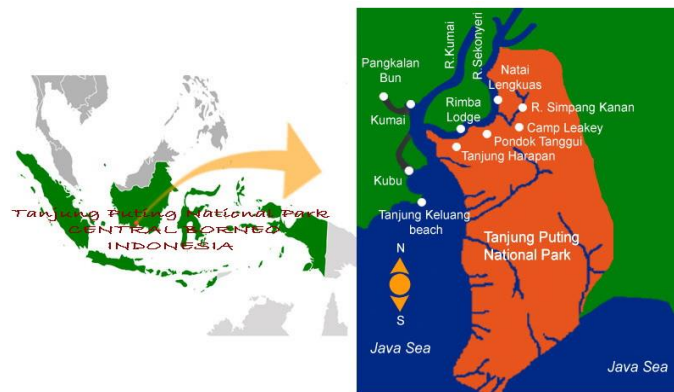
Prospek yang mengkhawatirkan ini memotivasi para ilmuwan orangutan dan konservasi, lembaga pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mencari solusi yang layak dan dapat menjamin kelangsungan hidup spesies ini di tengah-tengah lajunya pembangunan ekonomi Indonesia. Hasilnya adalah strategi konservasi multi pihak yang menggabungkan kepentingan publik, swasta dan lokal, dan menemukan landasan bersama dalam konservasi orangutan antara *stakeholders*.

Taman Nasional Tanjung Puting pada tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.777/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 menetapkan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Nasional Tanjung Puting Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 415.000 Ha. Keputusan ini dideklarasikan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 di Bali.⁶

⁵<https://www.iucnredlist.org/> diakses pada 22 januari 2018

⁶ Website Balai Taman Nasional Tanjung Puting
<https://tntanjungputing.org/sejarah> diakses pada 22 Januari 2018

Gambar 2: Peta Taman Nasional Tanjung Puting



Sumber; [google](http://asianitinerary.com/orang-utan-tanjung-puting/) (<http://asianitinerary.com/orang-utan-tanjung-puting/>)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 terjadi pengurangan luas kawasan TN Tanjung Puting menjadi \pm 410.694 ha. Pengurangan luasan tersebut terdapat di wilayah Desa Sungai Cabang, Desa Teluk Pulai, Desa Sungai Perlu, dan wilayah Tanjung Harapan.

Menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kriteria Penetapan Taman Nasioanal adalah sebagai berikut :

- a) Kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan dengan fungsi pokok sebagai

kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- b) Memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis fauna atau satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- c) Untuk tujuan koleksi flora dan fauna yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- d) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat
- e) Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendefinisikan taman nasional sebagai area alami di daratan maupun di lautan yang ditunjuk untuk melindungi dan memelihara integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang; melarang eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan peruntukkan kawasan dan; memberikan keuntungan untuk

kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan peluang pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat.⁷ Pada saat ini jumlah taman nasional yang ada di Indonesia sebanyak 50 taman nasional yang tersebar dalam beragam ekosistem baik di daratan (terrestrial), pesisir dan perairan (laut).

Taman nasional masuk kedalam kategori II kawasan konservasi IUCN yang merupakan area perlindungan yang dikelola dengan fungsi utama untuk konservasi spesies dan jenis habitat yang kaya serta untuk rekreasi. Prinsip pokok pengertian taman nasional adalah sebagai berikut;

1. Suatu area yang memiliki keunikan yang tinggi nilai keberadaan jenis yang dikonservasi, layanan ekosistem, type habitat, bentangan alam yang menarik, pemandangan yang indah, budaya/ tradisi masyarakat yang menarik.
2. Area yang luas cukup untuk menjamin kesendirian atau dengan dukungan tambahan dari sebuah jaringan kawasan lindung lainnya yang telah ditetapkan.
3. Konservasi dari kelangsungan hidup dan dinamika lingkungan alam dari keanekaragaman hayati yang

⁷[IUCN] *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*. 2009. *The IUCN Red List of Threatened Species*.

sesuai dengan tujuan rancangan keruangan alam dan skala sementara di atas. (IUCN, 2008).⁸

Taman nasional di Indonesia dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai/Balai Besar Taman Nasional yang secara struktur organisasinya di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Dasar pengelolaan taman nasional di Indonesia berlandaskan peraturan Menteri Kehutanan No. P. 03/Menhut II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Lebih lanjut, menurut *United Nation Commission on Sustainable Development* (UNCSD) menyebutkan ekowisata adalah pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) sebagai berikut :

- 1) menjamin partisipasi yang sejajar, efektif dan aktif dari semua komponen yang terkait;
- 2) menjamin partisipasi masyarakat lokal yang setuju atau tidak dalam pengembangan masyarakat, lahan dan daerah;
- 3) Mengangkat keterlibatan masyarakat lokal dalam mengontrol dan memelihara sumberdaya.⁹

⁸ibid

⁹ HUBUNGAN ECOTOURISM, ECOLOGICAL TOURISM, RESPONSIBLE TOURISM DAN SUSTAINABLE TOURISM
<https://cayetourism.wordpress.com/2009/03/11/hubungan-ecotourism->

Menurut Nugroho ekowisata adalah bagian kecil dari kegiatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan merupakan kegiatan perjalanan wisata yang di selenggarakan secara professional, terlatih dan memuat unsur pembelajaran, sebagai sumber ekonomi, yang memperhatikan warisan kebudayaan, partisipasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta melakukan usaha untuk konservasi sumberdaya alam dan lingkungan.¹⁰

Lebih lanjut, ekowisata melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu pengelolaannya sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat ataupun pemerintah setempat telah tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah yaitu “pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat” yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip ekowisata yaitu peran aktif masyarakat sekitar dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan adanya pengembangan ekowisata ini masyarakat diberdayakan melalui kegiatan pariwisata. Sementara itu Wood memberikan definisi ekowisata sebagai bentuk usaha di bidang wisata alam

[ecological-tourism-responsible-tourism-dan-sustainable-tourism/](#) di akses pada 4 oktober 2017

¹⁰ Nugroho, I. 2011. Ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Pustaka Pelajar.

yang dikelompokkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.¹¹

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar didunia memiliki daya tarik wisata tersendiri untuk menjadi negara destinasi wisata dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas wilayah terbesar, jumlah penduduk terbanyak dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Adapun Indonesia di era keterbukaan informasi sekarang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam termasuk cagar alam dan suaka marga satwa yang dapat dijadikan sebagai tujuan destinasi wisata untuk dapat dinikmati oleh para pelancong wisatawan domestik maupun internasional, tidak hanya Bali saja sebagai penyumbang terbesar devisa melainkan daerah lain juga.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi salah satu sektor andalan perekonomian nasional yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain guna menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan perolehan devisa. Dengan demikian, banyaknya wisatawan yang berkunjung dan besarnya dana yang dibelanjakan oleh wisatawan selama berada di Indonesia berpengaruh dalam penentuan penerimaan devisa. Penyediaan data dan informasi kepariwisataan yang berkesinambungan, dapat digunakan sebagai dasar

¹¹ Wood, M.E. 2002. Ecotourism : Principles, Practices and Policies for Sustainability. UNEP. <http://unepie.org/tourism/library/ecotourism.html>

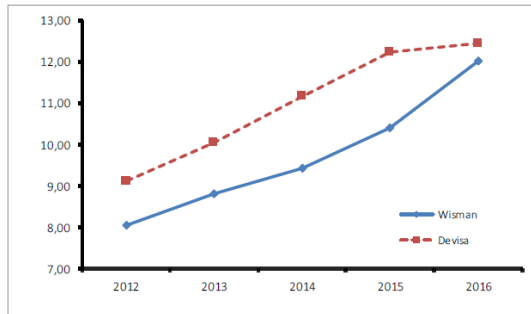
pengambilan kebijakan yang tepat mengenai strategi pengembangan kepariwisataan nasional.

Pada tahun 2016 Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Imigrasi, PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II, Administrator Bandara/Pelabuhan Laut, Bank Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Peguruan Tinggi Negeri maupun Swasta melaksanakan serangkaian kegiatan Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (*Passenger Exit Survey*) di 13 (tiga belas) pintu masuk internasional, meliputi: bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2016, dengan tujuan utama memperoleh data pengeluaran wisatawan mancanegara yang akan digunakan sebagai dasar menghitung penerimaan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2016.

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia dan Devisa Tahun 2012 - 2016¹²

¹² Kementerian Pariwisata “*Statistik Profil Wisatawan Mancanegara Tahun 2016*” Hal. 4



Sumber : BPS dan Kemenpar

Data yang telah dihimpun mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016 meningkat sebesar 15,54% yakni sebanyak 12.023.971 kunjungan dibanding tahun 2015 sebanyak 10.406.759 kunjungan, sedangkan devisa yang diperoleh sebesar 12,44 miliar USD atau mengalami peningkatan sebesar 1,75% dibanding tahun 2015 sebesar 12,23 miliar USD.¹³

Di era modern saat ini pariwisata telah menjadi salah satu industri besar yang digunakan untuk memperkenalkan sumber daya alam suatu Negara ke Kancah Internasional. Dalam waktu kurun dua puluh tahun terakhir UNWTO (*Global Code of Ethics for Tourism*) mencatat rekor jumlah wisatawan internasional pada tahun 2012 mencapai 1 milyar orang dengan pendapatan ekspor internasional sebesar 1,3 triliun US\$. Pada tahun 2013 jumlah wisatawan internasional meningkat menjadi 1,08 milyar, dan lebih dari 6 milyar wisatawan memenuhi wisata dalam negeri masing-masing. Sedangkan dalam perkiraan jumlah wisatawan internasional akan meningkat pada

¹³Ibid Hal.3

tahun 2020 menjadi 1,4 milyar dan pada tahun 2030 diperkirakan lebih meningkat menjadi 1,8 milyar jumlah wisatawan internasional.

Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam sebuah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1979, beralih menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pembinaan izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat. Dalam era otonomi daerah tersebut, segala urusan kepariwisataan terutama yang menyangkut usaha dan jasa pelayanan pariwisata menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, maka kekuatan-kekuatan suatu daerah disamping mengandalkan kemampuan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah seperti sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan industri, dimasa depan tetap memegang peranan strategis dan pariwisata diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru dalam perekonomian daerah.

Pengembangan kepariwisataan terutama di kawasan cagar alam harus dimaknai juga menyentuh aspek pelestarian. Hal ini dimaksudkan untuk membuka pikiran dan pemahaman masyarakat bahwa strategis dan vitalnya sektor tersebut bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta menumbuhkan rasa mencintai dan bangga terhadap kebudayaan lokal. Sedangkan untuk potensi wisata yang patut mendapat

perhatian lebih untuk dikembangkan adalah *eco tourism*, yaitu pengembangan pariwisata berbasis alam, mengingat objek-objek yang dapat dijadikan kawasan wisata tersebar pada semua daerah dan belum secara maksimal mendapat perhatian dari pemerintah daerah berupa pendukung pemanfaatan kawasan sebagai kawasan kreatif dan produktif, yang dapat memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat lokal.

Lebih lanjut, Taman nasional Tanjung Puting terletak di kabupaten Kotawaringin Barat dan kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tanjung Puting merupakan salah satu “icon” ekowisata bagi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata alam dan melihat Orangutan. Tanjung Puting merupakan cagar biosfer dan taman nasional yang meliputi bidang-bidang aluvial rawa antara teluk Kumai dan sungai Seruyan. Memiliki luas total 415.040 hektar, Tanjung Puting dikenal memiliki keragaman besar ekosistem hutan, termasuk hutan dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan tropis panas yang disebut "kerangas", hutan rawa gambut, hutan mangrove, dan hutan pantai.¹⁴

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Tanjung Puting dari tahun ke tahun meningkat berbanding jauh dari wisatawan nusantara menurut laporan dinas kabupaten kotawaringin barat dari tahun 2011 sampai 2017 ialah;

¹⁴ Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat “Pariwisata Kotawaringin Barat Sebuah Buku panduan” Hal. 7

Table 1: Data Kunjungan wisatawan mancanegara dan
 wisatatawan nusantara di objek wistara Taman Nasional
 Tanjung Puting 2012-2017

Tahun	Wisman	Wisnu
2011	5.444 orang	3.102 orang
2012	7.727 Orang	4.559 orang
2013	8.349 orang	4.916 orang
2014	10.986 orang	5.703 orang
2015	9.767 orang	2.797 orang
2016	8.942 orang	6.164 orang
2017	14.933 orang	9.760 orang

Sumber; Web Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat¹⁵

Tabel di atas menunjukkan antusias kunjungan wisatawan mancanegara sangat tinggi, akibat peningkatan kunjungan mencapai angka Rp 6.040.157.500 sepanjang 2017. Angka ini memecahkan rekor tertinggi sebelumnya, yaitu Rp 4.670.125.461 pada 2016.¹⁶

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat diakses dari <http://dispar.kotawaringinbaratkab.go.id/data-kunjungan-wisatawan/> diakses pada tanggal 17 November 2018

¹⁶Nugroho Budi Baskoro, "Kunjungan Wisatawan ke Tanjung Puting Pecahkan Rekor, PNBP Rp 6 Miliar ' diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2018/01/11/182300227/kunjungan-wisatawan-ke-tanjung-puting-pecahkan-rekor-pnbp-rp-6-miliar>, pada tanggal 17 November 2018

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka muncul pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

Bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Berhasil Meningkatkan Jumlah wisatawan Mancanegara ke Obajek Wisata taman Nasional Tanjung Puting ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Taman Nasional Tanjung Puting. Dari tujuan tersebut dapat memusatkan perhatian penelitian terhadap dampak atas kunjungan wisatawan mancanegara terhadap perubahan sektor ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, dan keuntungan yang diperoleh Kab. Kotawaringin Barat.
- b. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis.
- c. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan serta menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.

- d. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu:

- a. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah daerah Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai tambahan baru atas masukan dan pertimbangan yang menjadi fokus penelitian ini guna membantu kinerja dari upaya pemerintah daerah serta peran masyarakat lokal untuk dapat melihat peluang dan tantangan terhadap perubahan daerah dari dampak atas upaya meningkatnya pariwisata di Taman Nasional Tanjung Puting.
- b. Bagi pihak akademisi, diharapkan thesis ini dipercaya dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak lain yang memiliki ketertarikan riset yang sama, lebih lanjut terhadap kajian peran aktor hubungan internasional yang mana penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Taman nasional Tanjung Puting menggunakan diplomasi ekonomi sebagai alat dari instrument *soft diplomacy* yang digunakan, sebagai salah satu bentuk dari diplomasi yang memiliki bentuk strategi aktor terhadap peluang dan

tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama internasional.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bentuk usaha peneliti yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan sebuah topik atau masalah, atau yang akan sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, maupun sumber-sumber tertulis baik secara cetak maupun elektronik lain.

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori atau hal yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya, untuk melakukan tinjauan pustaka, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan dapat dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986).

Dibawah ini adalah beberapa penelitian tentang Tanjung Puting yang pernah dilakukan dan memiliki kaitan dengan penelitian ini;

Table 2. Tinjauan Pustaka

No	Nama/Judul	Metode	Hasil	Kebaruan Kajian
1.	Ninik Herwiyati, 2016 Pengaruh Motivasi, Kemitraan Eksternal dan kerja Tim Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai serta Kerja Organisasi, studi kasus: Balai Taman Nasional	Menggunakan desain Penelitian dan populasi sampel	Terdapat lima hasil analisis yaitu: 1. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja pegawai di TNTP. 2. Kemitraan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja	Penelitian ini berbeda dari topik yang diangkat oleh penulis yaitu strategi pemerintah Kab. Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kunjungan wisma di TNTP.

	Tanjung Puting, Kalimantan Tengah (Tesis) Jakarta: Universitas Terbuka		pegawai di TNTP 3. Kerja Tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pegawai di TNTP 4. Efektifitas kerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi di TNTP	
2.	Johan Setiawan 2011. Kepariwisata alam Merespon Tantangan Perubahan	Mempergunakan analisis table silang dan uji korelasi dalam menggambarkan angka-	Hasil penelitian Tanjung Puting memiliki karakteristik ekowisata yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap isu -	Berbeda dengan penelitian ini, lebih memfokuskan ekowisata sebagai

<p>Iklm Studi Kasus Di Taman Nasional Tanjung Puting (Tesis). Yogyakarta Universitas Gadjah Mada.</p>	<p>angka serta mempergunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang detail pilihan respond dan stimulus</p>	<p>isu lingkungan. Wisatawan taman nasional Tanjung Puting menyadari perubahan iklim merupakan tantangan serius dan perlu dilakukan langkah - langkah <i>responsive</i> yang konkret. Wisatawan cenderung tidak mau melakukan perjalanan gabungan dengan kelompok lain menggunakan kelotok umum dalam rangka efisiensi bahan bakar dan</p>	<p>salah satu alat untuk menjadikan TNTP sebagi “icon” sedangkan penulis lebih melihat kosep ekowisata sebagai alat untuk meningkatkan kunjungan di TNTP</p>
---	--	--	--

			mitigasi gas buang.	
3.	Mahasiswa Laras Mitra Prayogi, Dosen M. Ruslin Anwar dan Dosen Alwafi Pujiraharjo. “Peluang Investasi pada Kawasan Wisata Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaring in Barat Provinsi Kalimantan Tengah	Menggunakan Kerangka Konsep Penelitian dengan analisi deskriptif secara skematis.	1. wisatawan masih membutuhkan beberapa sarana yang di sediakan TNTP berupa Campground, Inn/Cottage, Restaurant, Klotok, Gift Shop dan Klinik Kesehatan. 2. Menggunakan Investasi BOT lebih baik untuk investasi maksimal masa konsesi 18 tahun dan investasi ini menjanjikan jika lebih dari 10 tahun	Penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur penelitian lebih lanjut dalam bentuk strategi pemerintah Kabupaten Kotawarin gin Barat meningkat kan kualitas di tempat wisata TNTP untuk menarik wisatawan mancanega ra.

	dengan Sistem Built Operate Transfer (Jurnal). Universitas Brawijaya		dilaksanakan tanpa sistem BOT	
4.	Endang Komesty Sianaga dan Bambang Sapto Utomo. "Kualitas Pelayanan Pemandu Ekowisata di Taman Nasional Tanjung Puting Kabupaten kotawaring in Barat	Menjelaskan secara deskriptif dan menggunakan Konsep Ekowisata yang dikutip oleh janianton Damanik dan Helmut F. Weber (2006:38) "Bentuk industri pariwisata berbasis lingkungan	Menunjukkan bahwa pertanyaan kuisisioner pemandu memiliki kualitas yang memuaskan berdasarkan aspek berwujud (tangible), empati (empathy), keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), dan jaminan	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemandu diperlukan tetapi tidak harus berkompeten karena wisman lebih membutuhkan sebagai pengantar. Walaupun

	<p>Kalimantan Tengah” (Jurnal). Dosen STP Bandung</p>	<p>yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam, budaya lokal dan menciptakan peluang kerja.</p>	<p>(assurance) dan hasil berbanding jauh akan tetapi pada dasarnya wisatawan tidak memperlakukan kualitas pemandu ekowisata di Tanjung Puting, namun yang menjadi kendala adalah kurangnya kemauan dan motivasi pemandu untuk meningkatkan kualitas dalam memandu. Maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa wisatawan yang</p>	<p>demikian bagi penulis (Try Danuwijaya) Untuk meningkatkan sektor wisata di Kab. Kotawaringin Barat dibutuhkan peran pemandu yang berkompeten untuk memberikan wawasan terhadap pengunjung yang datang ke TNTP demi</p>
--	---	--	--	---

			<p>datang berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting tidak keberatan pemandu wisata yang membawa mereka tidak memberikan informasi mengenai ekowisata dan bahasa yang diperlukan wisatawan. Para wisatawan hanya membutuhkan pemandu untuk mengantar mereka melihat dan bertemu dengan orangutan tanpa memperdulikan</p>	<p>meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di wilayah Kab. Kotawaringin Barat</p>
--	--	--	---	---

Dalam buku yang di tulis oleh Takdir Ali Mukti dengan judul buku “ *Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh*

			aspek-aspek di atas.	
--	--	--	----------------------	--

Pemda di Indonesia” buku ini membahas tentang : ‘*the foreign policy of non-central governments*’ aktor internasional, baik pada tingkat negara, lokal, institusional maupun individual dapat melakukan hubungan transnasional. Hubungan transnasional tidak menghapuskan sendi utama kedaulatan “suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share” kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya. Buku ini juga membahas tentang peraturan-peraturan dari segi hukum internasional, undang-undang dasar samapai peraturan pemerintah daerah¹⁷

Buku ini termasuk dalam literature yang akan digunakan sebagai bagian dari pembahasan sebuah teori yang termasuk dalam ranahhubungan pemerintah daerahdengan pemerintah luar dan diangkat untuk memudahkan dalam proses pada penelitian ini. Buku ini merupakan salah satu buku di Indonesia yang mengupas kajian tentang paradiplomasi yang ditinjau dari 4 (empat) aspek sekaligus, yakni aspek teoritis ilmu Hubungan Internasional, aspek Yuridis (hukum nasional dan hukum perjanjian internasional), aspek Diplomasi, dan dari aspek Praktis pembuatan kerjasama internasional. Kekuatan buku ini terletak pada upayanya untuk membangun 3 (tiga) pikiran utama, yakni, pertama, membangun konstruksi hubungan dan

¹⁷Takdir Ali Mukti, 2013, “*Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*”, Yogyakarta

kerjasama luar negeri secara umum sekaligus meletakkan posisi penda selaku aktor hubungan transnasional dalam skema itu; kedua, membangun konstruksi hukum dalam kerjasama luar negeri; dan, ketiga, membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerjasama luar negeri.

E. Kerangka Teori

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.¹⁸ Sehingga teori pasti hasil dari gabungan beberapa konsep yang membentuk suatu kesimpulan.¹⁹ Kerangka dasar teori diperlukan dalam menganalisis masalah yang telah dirumuskan sebagai dasar penulisan tesis ini.

Untuk menganalisa permasalahan yang telah rumuskan di latar belakang, penulis akan menggunakan teori dan konsep sebagai landasan, yaitu:

1. Teori Diplomasi Ekonomi

Dalam ekonomi politik internasional, hubungan antara aktor, pemerintah atau pelaku ekonomi yang dapat dicapai melalui komunikasi antar pihak, salah satunya dengan diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan instrumen atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak seperti pejabat

¹⁸Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal.186.

¹⁹Ibid, hal. 93-94.

pemerintah yang mewakili negaranya di negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Salah satu tugas utama diplomasi adalah mendorong hubungan ekonomi negara yang diwakili terhadap negara tujuan, khususnya dalam hal menjaga hubungan pasar, proteksi, dan pengawasan. Aktivitas inilah yang kemudian disebut sebagai diplomasi ekonomi.²⁰

Diplomasi ekonomi adalah diplomasi yang menggunakan instrument ekonomi untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara (atau lembaga lain seperti korporasi) tertentu. Secara umum, diplomasi ini diterjemahkan sebagai proses pengajuan kebijakan dan keputusan serta berbagai konsultasi tentang kemudahan dan prospek ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan nasional, untuk dinegosiasikan agar dapat disepakati oleh negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Diplomasi ekonomi biasa merujuk kepada kepentingan untuk masalah perdagangan ekspor - impor, investasi, pinjaman, pelaksanaan proyek pembangunan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.²¹

Diplomasi ekonomi merupakan suatu instrumen penting bagi negara dalam mencapai kepentingan nasional, khususnya terkait kepentingan ekonomi. Meski secara tradisional diplomasi ekonomi dipahami sebagai aktivitas

²⁰ Baranay, 2009. Pavol. '*Modern Economic Diplomacy*'. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club.

²¹ Solichin, Harianto dan Taat Subekti. *Op. Cit.*, hal 35.

yang hanya dilakukan oleh kalangan elit atau politisi, namun pada perkembangannya, aktor non-negara juga memiliki posisi yang penting, dimana hal ini justru sangat signifikan tertelak pada pelaku ekonomi seperti para pengusaha.

Adapun fungsi dan peran diplomasi ekonomi di era modern berdampak lebih luas, yang mana hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan *power* negara (secara ekonomi) serta posisinya dalam sistem internasional. Melalui diplomasi ekonomi, negara dan pelaku ekonomi dapat memperluas jaringan dan hubungannya dengan mitra dagang atau negara lain secara damai, yang kemudian diharapkan dapat menciptakan situasi *win-win*.

Menurut Kishan S. Rana (2007) dalam tulisannya menjelaskan beberapa faktor zspenting yang membuat diplomasi ekonomi berjalan sukses, yaitu sebagai berikut;

1. Hubungan ekonomi luar negeri melibatkan beberapa aktor tidak hanya kementerian luar negeri, perdagangan, dan industri negara yang bersangkutan, namun juga melibatkan berbagai unit bisnis di negara tersebut, seperti asosiasi industri dan perdagangan, sektor finansial, sekolah dan lembaga penelitian bisnis, industri pariwisata, dan aktor domestik yang merupakan stakeholder sekaligus prime mover.
2. Struktur kementerian luar negeri dan badan pengaturan ekonomi eksternal harus terintegrasi dan selaras. Kebijakan ini telah banyak diambil oleh

negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Islandia, dan negara lain seperti Australia, Brunei, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru dan beberapa negara di Karibia. Negara-negara Skandinavia diatas telah secara utuh mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi, serta kebijakan perdagangan dan bantuan luar negeri kedalam kementerian luar negeri.

3. Membuat prioritas “Sister City” diplomasi ekonomi yaitu antara promosi ekspor dan mobilisasi kedalam investasi asing. Promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar negeri; studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli-penjual.
4. Kerangka peraturan dagang yang secara sah ditentukan oleh pemerintah merupakan pemikiran bersama dengan pelaku bisnis serta thinktanks dan scholars yang bertujuan untuk membentuk kondisi yang meningkatkan perdagangan dan investasi negara.
5. Harus membedakan antara diplomasi ekonomi yang beroperasi di ibukota negara dan di lapangan melalui rangkaian hubungan yang ada di kedutaan dan konsuler.

6. Adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap-tiap negara. Misi diplomatik yang dijalankan oleh orang-orang terlatih dan staf profesional memberikan keuntungan kekuatan dan pengaruh negara yang diwakilinya, dimana menurut Rana contohnya adalah Singapura.²²

Diplomasi ekonomi adalah kegiatan multifungsi, mudah untuk menjelaskan dalam sapuan kuas yang luas, tapi lebih sulit untuk dijabarkan dengan presisi. Dari perspektif anggota layanan diplomatik dan komersial atau perdagangan, dan mereka merupakan pelanggan atau pengguna layanan, diplomasi ekonomi adalah seperangkat jamak dari praktek, semua bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi eksternal dalam negeri.

Dilihat cara ini, kementerian dan jajaran yang dinaunginya, kedutaan besar dan konsulat, sebagai juga kamar dagang, badan industri, badan promosi ekspor dan lembaga penelitian yang berhubungan dengan pekerjaan ini, semua penyedia layanan untuk pelanggan di dunia nyata ini. Tugas mereka adalah untuk memberikan informasi, dan memfasilitasi pelanggan ini dalam interaksi mereka di luar negeri.

Ketika instansi pemerintah menetapkan kerangka kebijakan dengan meringkai aturan dan hukum yang

²² Rana, S. Kishan, 2007. "Economic Diplomacy: the Experience of Developing States," dalam *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*, ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Hampshire: Ashgate Publishing. Hal. 204 - 207

mengatur kegiatan tersebut, atau menegosiasikan perjanjian bilateral, regional atau global, mereka masih dalam peran dasar mereka dari penyedia layanan. Para pelanggan adalah pemilik sebenarnya dari diplomasi ekonomi. Mereka juga aktor yang benar-benar menghasilkan perdagangan komoditas dan jasa, melaksanakan kegiatan investasi asing di rumah dan di luar negeri, dan melaksanakan kemitraan teknologi.

Perkembangan peran dan fungsi diplomasi ekonomi pada sistem ekonomi internasional modern didorong oleh berbagai faktor yang mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Proses internasionalisasi dan penguatan dependensi sistem ekonomi dunia mengarahkan pada dua hal, yaitu integrasi global dan regional;
- 2) Ekspansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar, liberalisasi perekonomian nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan dan investasi internasional, serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan multinasional, bank, dan kelompok investasi;
- 3) Globalisasi ekonomi; gabungan antara proses internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan multinasional berdampak pada peningkatan peran diplomasi ekonomi. Dalam

hal ini, diplomasi ekonomi berperan dalam mendorong perkembangan internasionalisasi di negara, namun disisi lain juga menahan kekuatan dari negara atau aktor lain yang berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi tersebut;

- 4) Bentuk adaptasi terhadap metode manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi baru – sehingga investasi asing dapat memastikan perkembangan kerjasama antarnegara dan organisasi internasional;
- 5) Perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal.

Hal ini berdampak pada pembangunan citra positif suatu negara yang akan menarik wisata asing dan daya tarik investasi asing sehingga dapat berdampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara²³.

Seperti halnya Trade Expo Indonesia, pemerintah dan jajarannya melakukan promosi tentang expo di kedutaan atau konsulat indonesia ke para pelaku ekonomi seperti pengusaha yang berada di wilayah tersebut untuk datang ke Indonesia. Sehingga kegiatan promosi seperti ekspor dapat mendorong dalam membangun kredibilitas, menemukan sebuah terobosan baru, membudidayakan dalam menghadirkan calon investor dari negara yang

²³*Ibid.*

ditargetkan, menciptakan sebuah organisasi delegasi bisnis yang diperlukan, adanya pembagian dalam mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah investasi, dan sejenisnya. Sehingga keamanan energi sangat diperlukan sebagai sarana pertumbuhan dari tindakan yang difokuskan dalam mempromosikan sebuah investasi yang terus melaju.

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu arah politik luar negeri Indonesia dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Kegiatan diplomasi ekonomi di forum multilateral dilakukan dengan menegosiasikan pembentukan aturan-aturan, norma-norma dan sistem-sistem yang berlaku secara internasional, membuka akses pasar produk ekspor Indonesia, mengamankan pangsa pasar produk lokal di pasaran domestik dan mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia.²⁴

Otonomi daerah telah memberikan wadah bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya seperti halnya potensi di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata dari daerah dapat memasarkan kepada calon mitra luar negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar. Selain itu, globalisasi dan otonomi daerah juga telah

²⁴ Kementerian Luar Negeri Indonesia “*Diplomasi Indonesia 2014*” hal. 190 (<https://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf>) diakses pada tanggal 10 oktober 2018

memberikan peluang bagi pengusaha UKM untuk melihat pasar luar negeri sebagai pasar potensial.²⁵

Seperti halnya kerjasama pemerintah Indonesia dan Swiss dalam FDI (Foreign Direct Investment) sektor investasi, berdasarkan data BKPM, sampai dengan Kwartal II Tahun 2014 tercatat nilai investasi Swiss di Indonesia sebesar USD 115,7 juta dengan 42 proyek. Sekitar 75 perusahaan Swiss saat ini beroperasi di Indonesia dan mempekerjakan kurang lebih 59.415 orang. Beberapa perusahaan besar Swiss di Indonesia antara lain: Ades Water, Crédit Suisse, Nestlé, Holcim, UBS, Zurich Insurance Société, dan lainnya.²⁶

.2. Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial dan ekonomi utama di era kontemporer. Pariwisata merupakan sebuah bisnis besar yang menjadikan peluang pada sektor ekonomi global. Pada akhir abad ke-20 sekitar pada tahun 1998 bahwa pariwisata internasional, hampir setiap tahunnya menghasilkan lebih dari US \$ 450 miliar. Menurut *The World Travel & Tourism Council (WTTC)* yang merupakan otoritas global untuk industri pariwisata, pertumbuhan pariwisata di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara lain yang tergabung dalam G20, dimana tahun 2014 pariwisata Indonesia mampu

²⁵ ibid

²⁶Kementrian Luar Negeri Indonesia Op.Cit., hal. 127

berkontribusi 8,4% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, diperkirakan bahwa angka-angka ini akan terus meningkat di masa yang akan datang.²⁷ Pariwisata telah lama dikenal sebagai industri yang telah melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha serta pertumbuhan dan harapan saat kenaikan statistik tahunannya sekitar 4% di kedatangan wisatawan internasional dan belanja, hal tersebut menunjukkan bahwa, pada tahun 2020, pariwisata internasional akan menghasilkan hingga US \$ 2 triliun per tahun.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa:

*“Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”.*²⁹

Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan, dijelaskan sebagai berikut:

²⁷ Hendra Gunawan, “WTTC: Pariwisata Indonesia tumbuh paling tinggi” diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/wttc-pariwisata-indonesia-tumbuh-paling-tinggi> pada tanggal 17 November 2018

²⁸ Richard Sharpley, 2002. Aspect of Tourism, ‘*Tourism & Development Concepts & Issues*’. Multilingual Matters.

²⁹ Undang-Undang RI No.10 Tahun, 2009 Tentang Kepariwisataan. <http://www.kemenpar.go.id> diakses pada tanggal. 04 oktober 2017

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

- h. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- i. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- j. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
- k. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

m. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.³⁰

Menurut data statistik WTO pada konsep panduan pariwisata yang berjudul *‘Tourism Satellite Account (TSA)* menjelaskan bahwa:

- a. *Tourism, described as "the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes"*; Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya.
- b. *Visitor, described as "any person traveling to a place other than that of his/her usual environment for less than 12 consecutive months and whose main purpose of travel is not to work for pay in the place visited"*; Dapat diartikan pengunjung adalah siapa pun yang melakukan perjalanan ke daerah lain di luar darilingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari

³⁰*Ibid*

12 bulan berturut-turut dan tujuan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di daerah tersebut.

- c. *Tourist, described as “overnight visitor, visitor staying at least one night in a collective or private accommodation in the place visited”*; Wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau pengunjung yang tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam di akomodasi umum ataupun pribadi.
- d. *Same day visitor, described as “excursionists, visitor who does not spend the night in a collective or private accommodation in the place visited”*; Pengunjung harian adalah ekskurionis, pengunjung yang tidak bermalam di akomodasi umum atau pribadi di daerah tujuan.³¹

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat dijabarkan beberapa unsur-unsur penting yang diperhatikan dalam hal pariwisata, antara lain:

- (a) Jenis aktivitas yang dilakukan dan tujuan kunjungan wisata,
- (b) lokasi kegiatan wisata (objek wisata),
- (c) waktu kegiatan di lokasi daerah tujuan wisata, dan

³¹United Nations and World Tourism Organization, 1994. *Recommendations on Tourism Statistics*, United Nations Series M, No 83, New York. Di muat pada [http: www. statistics.unwto.org](http://www.statistics.unwto.org) di akses pada tanggal. 04 oktober 2017

(d) pemanfaatan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh usaha dari sebuah kegiatan wisata.

Adanya penegasan WTO dalam deklarasi Manila tentang Pariwisata Dunia bahwa; ‘pariwisata dunia dapat berkontribusi untuk pembentukan tatanan ekonomi internasional baru yang akan membantu untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi yang telah melebar antara negara maju dan berkembang dan menjamin percepatan kestabilan pembangunan ekonomi dan sosial dan kemajuan, khususnya di negara-negara berkembang’³².

Dalam hal tersebut menanggapi bahwa pariwisata secara luas dianggap sebagai sarana dalam pencapaian pembangunan di daerah tujuan, sehingga pembenaran untuk promosi pariwisata di setiap daerah ataupun wilayah kurang berkembang dalam dunia industri merupakan sebuah kontribusi dugaan terhadap pembangunan. Dalam konteks ini, pariwisata tidak melihat hanya sebagai proses perubahan dan menimbulkan pembangunan tetapi juga merupakan sebagai sebuah perubahan sosial, politik dan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata internasional dipandang sebagai sarana untuk mencapai sebuah pembangunan kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara serta redistribusi kekayaan dan kekuasaan yang diperlukan untuk mencapai seperti sebuah

³²World Tourism Organisation (WTO) (1980) *Manila Declaration on World Tourism*. World Tourism Organisation: Madrid

pembangunan. Pada tahun 1974, *United Nations* telah mengusulkan pembentukan sebuah Tatanan Ekonomi Internasional Baru untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam struktur ekonomi dan politik internasional yang ada, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan tentang struktur, kepemilikan dan kontrol dari pariwisata internasional.

Pariwisata merupakan sebuah tiang pertumbuhan, dalam hal ini pemerintah mengidentifikasi sebuah lokasi, yang biasanya berada di daerah marjinal ekonomi yang dianggap sesuai untuk mempertahankan bentuk pengembangan pariwisata. Dengan inisiatif dan insentif pemerintah, investasi publik dan swasta disuntikkan ke area yang dipilih seringkali dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur bersubsidi. Insentif tersebut menarik pengembangan pariwisata tambahan dan pegawainya. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menjadi mandiri dan terlepas dari pariwisata populasi penduduk yang masih kritis. Sehingga pariwisata dijadikan isu pembangunan daerah yang mampu menggambarkan sebagai bentuk upaya insentif pemerintah sebagai tolak ukur dari tiang pertumbuhan ke daerah sekitarnya.³³

Menurut Caalders (2000) menyatakan dalam perencanaan ekonomi regional menekankan bahwa dalam menarik industri asing yang mampu menciptakan tiang

³³Weaver, D. and Oppermann, M. (2000) *Tourism Management*. Brisbane: John Wiley and Sons

pertumbuhan regional dan berfungsi sebagai faktor penarik untuk kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini bertujuan untuk membuka daerah terhadap tren ekonomi global dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang ketergantungan. Jenis kerentanan terhadap perusahaan pariwisata multinasional ini sering diidentifikasi dalam literatur pariwisata sebagai dampak negatif pariwisata serta seruan yang telah dibuat untuk pengembangan yang lebih terkontrol secara lokal.³⁴

Menurut Hirschman 1972, dikutip dalam (Blair, 1995) berpendapat bahwa negara-negara terbelakang, dan karenanya daerah tertinggal, memiliki saling ketergantungan yang lemah dan keterkaitan yang lemah ke belakang dan ke depan. Jika pariwisata adalah menjadi alat pembangunan yang berhasil, itu akan menjadi penting untuk memperkuat hubungan dalam ekonomi lokal.³⁵

Dalam membahas hubungan antara pariwisata dan pembangunan daerah, Williams dan Shaw (1995) meneliti tiga aspek pariwisata:³⁶

- a. pariwisata merupakan produk yang harus dikonsumsi pada titik produksi

³⁴Caalders, J. (2000) *Tourism in Friesland: A network approach*. In G. Richards and D. Hall (eds) *Tourism and Sustainable Community Development*. Routledge: London. (Pp. 185-204)

³⁵Blair, J. (1995) *Local Economic Development: Analysis and Practice*. London: Sage.

³⁶Williams, A. and Shaw, G. (1995) *Tourism and regional development: Polarization and new forms of production in the United Kingdom*. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 86 (1), 50–63.

- b. Sebagian besar bentuk pariwisata sangat temporal
- c. pariwisata merupakan industri yang mengalami restrukturisasi

Dalam konteks pariwisata massal, titik-titik pasokan secara spasial tetap dan tunduk menjunjung tinggi polarisasi spasial. Titik-titik ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti iklim dan distribusi geomorfologi obyek wisata, seperti pantai / sinar matahari dan pegunungan / salju. konstruksi sosial juga memiliki peran dalam membedakan apa yang penting bagi wisatawan untuk melihat.

Sedangkan fitur kedua adalah bahwa pariwisata memiliki tingkat musiman, yang dapat menghasilkan dikotomi antara pekerja dengan karyawan di pinggiran yang memegang kontrak sementara. Elemen terakhir dari analisis mereka adalah kenyataan bahwa pariwisata telah mengalami proses restrukturisasi yang telah melihat perkembangan berbagai bentuk wisata yang berbeda seperti pameran warisan budaya dan industri, yang memiliki atribut spasial yang berbeda. Beberapa jenis 'yang baru' ini bermanfaat bagi keuntungan sementara yang lain menguntungkan pinggiran kota.

F. **Hipotesa**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atas peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Tanjung Puting 2012 s/d 2017 adalah:

1. Program Pemerintah Kabupaten KOBAR Dalam Rangkaian Aktivitas Kegiatan Pariwisata Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara.
 - a. Program Pemerintah KOBAR dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Mancanegara
 - b. Aktivitas Pariwisata KOBAR dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara.
 - c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2. Pengembangan Pariwisata Dalam Pertumbuhan Sektor Ekonomi dan Industri Sebagai Bagian Dari Kebijakan Promosi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - a. Kerjasama pemerintah KOBAR dengan INGO (*International Non Government Organization*) melalui Swisscontact
 - b. Potensi Investasi di Kotawaringin Barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³⁷

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari pelebaran penjelasan pada penelitian tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Mempromosikan Pariwisata Taman Nasional Tanjung Puting Ke Kancan Internasional. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan sebuah penelitian. Adapun jangkauan dalam penelitian ini dimulai sejak tahun 2012 saat dimana perkembangan wisatawan mancanegara semakin meningkat dilima tahun terakhir hingga tahun 2017

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis akan gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku atau aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan dipaparkan terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu:

- BAB I. Membahas tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II. Memaparkan rangkaian dinamika pengembangan potensi destinasi pariwisata Taman Nasional Tanjung Puting yang menjadikan sebagai bagian dari peluang dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kab. Kotawaringin Barat.
- BAB III. Mengemukakan perkembangan kinerja pariwisata di Taman Nasional Tanjung Puting dalam beberapa tahun terakhir sebagai kaca perbandingan dalam melihat pertumbuhan angka kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.

- BAB IV.** Menganalisis bentuk dari strategi pemerintah daerah Kab Kotawaringin Barat terhadap pengembangan pariwisata atas kunjungan wisatawan mancanegara di Taman Nasional Tanjung Puting dan kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah KOBAR dengan Swisscontact.
- BAB V.** Kesimpulan. Bab ini berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya